

BENCANA DAN PELESTARIAN LINGKUNGAN: PANDANGAN ETNIK JAWA DAN MADURA DI WILAYAH UJUNG TIMUR JAWA

Nawiyanto

Jurusan Sejarah, Universitas Jember

email: snawiyanto@gmail.com

ABSTRACT

Disasters and environmental conservation are urgent issues in Indonesia. Studies on aspects and issues of the environment especially during the contemporary period have been produced. Besides the lack of historical insights and the ignorance of folks' conceptions about disaster and environment, these studies have largely focused on particular element of the environment especially the forests and more importantly on the official or government's views. This article seeks to explore views, knowledge, and beliefs concerning disasters and environmental conservation among the Javanese and Madurese ethnic groups. The article employs a combination of historical and oral history methods. The historical method is used to trace the roots of their conceptions on disasters and environmental conservation especially the forests based on documentary sources. Oral history method is used to get information stored in human memories by conducting interviews.

Keywords: disaster, environment, conservation, Javanese, Madurese, Besuki

ABSTRAK

Bencana dan pelestarian lingkungan merupakan isu yang sangat urgen di Indonesia. Berbagai kajian memang telah dihasilkan mengenai berbagai aspek dan isu lingkungan khususnya pada masa kontemporer. Selain lemah akan wawasan historis dan konsepsi kultural masyarakat, kajian-kajian tersebut masih terpusat pada elemen tertentu dari lingkungan khususnya hutan dan lebih penting lagi menekankan pandangan pemerintah. Oleh karena itu, kajian ini bertujuan mengeksplorasi pandangan, pengetahuan, dan kepercayaan terkait dengan bencana dan pelestarian lingkungan di kalangan kelompok etnik Jawa dan Madura. Penelitian ini menggabungkan metode historis dan sejarah lisan. Metode historis digunakan untuk melacak akar-akar pandangan masyarakat bencana alam dan pelestarian lingkungan khususnya hutan berdasar informasi dokumen. Metode sejarah lisan digunakan untuk menggali informasi yang tersimpan dalam memori manusia melalui wawancara.

Katakunci: bencana, pelestarian lingkungan, etnis Jawa, etnis Madura, Besuki

PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara yang rawan bencana. Sebagian bencana seperti gempa bumi, letusan gunung, tsunami, puting beliung terjadi di luar pengaruh manusia. Untuk sebagian bencana lainnya, kegiatan manusia sampai tingkat tertentu ikut menjadi faktor penyebab. Terlepas dari ada tidaknya pengaruh aktivitas manusia dalam peristiwa ben-

cana, fenomena bencana tampak datang silih berganti seiring dengan perjalanan dan peredaran musim. Bahkan, bencana yang menimpa Indonesia ditengarai semakin meningkat frekuensinya. Hal ini diindikasikan oleh catatan statistik mengenai kejadian bencana. Pada tahun 2002 tercatat ada 190 kali bencana dan pada tahun 2009 tercatat 1.675 kali bencana menimpa Indonesia (Suhanda, ed., 2011:15), artinya terjadi peningkatan fre-

kuensi hampir sembilan kali lipat

Kerugian yang ditimbulkan bencana juga tidak kecil, bahkan cenderung meningkat. Kerugian akibat banjir yang melanda Jakarta pada bulan Februari 2007 saja misalnya, menurut taksiran Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS) dan *United Nations Development Program* (UNDP) mencapai kisaran Rp. 8,8 trilyun. Dapat dipastikan kerugian akibat banjir secara nasional lebih besar dari angka ini mengingat bencana serupa juga melanda berbagai wilayah Indonesia lainnya. Berdasarkan Data Informasi Bencana Indonesia (DIBI) Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), diketahui bahwa bencana banjir menyumbang sekitar 35 persen dari jumlah peristiwa bencana yang terjadi dalam kurun waktu 1997-2009 yang mencapai total sebanyak 6.632 kali (*Kompas*, 1 Maret 2010).

Perkembangan gerakan konservasi tidak dapat dipisahkan dari kekawatiran akan bencana yang telah dan akan terjadi. Pada masa lampau, gerakan konservasi hutan muncul di Eropa sebagai respon terhadap bencana banjir yang terjadi di Perancis. Di Indonesia, persoalan ini sudah dikaji sejak masa kolonial, di antaranya oleh F. W. Junghuhn, J.W.H. Cordes, S.P. Ham, A. de Jong dan G.S. de Graaf. Rangkuman karya-karya mereka muncul dalam bentuk buku kumpulan abstrak yang disunting Van Goor dan Kartasubrata (1982). Buku ini memperlihatkan bahwa sejak zaman Belanda terdapat perdebatan luas di antara para ilmuwan mengenai nilai-nilai hidrologis hutan pegunungan. Sekalipun bukti-bukti ilmiah belum meyakinkan, para penganjur teori spons menang atas kelompok ilmuwan yang mengusung gagasan bahwa tata air dipengaruhi oleh formasi geologis dan sifat-sifat tanah. Sejak saat itu teori spons membentuk kebijakan kehutanan dalam kaitannya dengan

pengelolaan hutan alam.

Di wilayah Besuki perlindungan area hutan tangkapan air juga tumbuh menjadi masalah serius, mengingat lanskap pegunungannya dan kegiatan pertanian yang terus meluas di kawasan ini. A.J.M. Ledeboer (1934) dalam karyanya mengenai perlindungan alam di Dataran Tinggi Hyang menyatakan bahwa keberadaan 13 industri gula di Besuki dan Probolinggo, lahan-lahan padi di Kraksaan, Bondowoso dan semua lahan padi di Jember, yang juga digunakan untuk penanaman tembakau, menggantungkan kebutuhan irigasinya pada air yang bersumber dari dataran tinggi Hyang. Sebagaimana tempat lain di Indonesia, kegiatan perladangan dianggap otoritas kolonial di Besuki sebagai ancaman utama terhadap hutan pegunungan pengatur hidrologi. Satu kelemahan menonjol dari karya-karya yang muncul pada zaman Belanda adalah diabaikannya pandangan masyarakat Indonesia. Apa yang lebih banyak disuarakan adalah konsepsi lingkungan alam dari sudut pandang pemerintah (orang-orang) Belanda.

Kajian Boomgaard (1999) berjudul "*Oriental Nature, its Friends and its Enemies: Conservation of Nature in Late-Colonial Indonesia* [Alam Timur, Sahabat dan Musuh-Musuhnya: Konservasi Alam di Indonesia Kolonial Akhir]", menunjukkan bahwa pemerintah Belanda mulai tahun 1880-an mencanangkan program penghutanan kembali sebagai upaya mengurangi bencana terkait dengan rusaknya lingkungan hutan. Kajian Boomgaard menunjukkan bahwa meskipun gerakan konservasi hutan telah mulai pada masa kolonial, namun hingga berakhirnya kekuasaan Belanda gerakan ini masih bersifat elitis dan terbatas pendukungannya.

Berbagai karya tersebut belum

mengungkap bagaimana lingkungan dipandang dalam perspektif penduduk pribumi Indonesia, apalagi dalam konteks perspektif kelompok etnik. Keberhasilan dalam mitigasi bencana dan pelestarian lingkungan mengharuskan pengintegrasian konsepsi penduduk di dalamnya. Oleh karena itu, artikel ini bermaksud mengeksplorasi persoalan bagaimana konsepsi etnik Jawa dan Madura mengenai bencana dan pelestarian di wilayah eks karesidenan Besuki. Secara lebih spesifik, tujuan kajian ini adalah: (1) memahami pandangan (*perception*), pengetahuan (*knowledge*), kepercayaan (*beliefs*) etnik Jawa dan Madura mengenai bencana alam dan pelestarian lingkungan, (2) menjelaskan perkembangan dan pergeseran pandangan kedua kelompok etnik tentang kedua isu.

Urgensi kajian ini dapat dilihat dari beberapa segi. *Pertama*, secara teoretis penelitian ini akan menjadi bagian penting dalam rintisan ke arah pengembangan sejarah lingkungan di Indonesia. Sebagian besar perhatian akademis selama ini tercurah pada isu-isu sosio-politis. Bagian lain mengenai hubungan manusia dengan lingkungannya, termasuk dalam konteks bencana dan pelestarian lingkungan, belum banyak diketahui. *Kedua*, Indonesia merupakan contoh negara dengan permasalahan lingkungan yang menggunung. Bencana datang silih berganti sepanjang tahun. Meskipun orang mungkin berpendapat bahwa sebab-sebab permasalahan lingkungan terletak pada masa kontemporer, dapat diargumentasikan bahwa inti persoalan sering tidaklah baru, tetapi mempunyai akar dan persamaan sejarah yang menjangkau beberapa abad silam. Ricklefs (1993:165) misalnya menyebutkan bahwa penggundulan hutan telah terjadi di berbagai tempat di pantai utara Jawa pada akhir abad ke-17

dan awal abad ke-18. Elson (1994:384-385) juga mencatat kerusakan hutan Jawa dalam kajian yang mengupas tuntas kehidupan pedesaan selama periode Tanam Paksa (1830-1870). Kajian mengenai sejarah lingkungan dapat menawarkan penjelasan atas pertanyaan mengapa persoalan lingkungan hadir atau tidak dijumpai pada masa lampau (Verstegen dan Van Zanden, 1994:328). Selalu berulangnya bencana memunculkan kesan bahwa bangsa ini menderita penyakit “memori pendek” sehingga cepat melupakan bencana yang dialami dan lupa mengambil langkah antisipasi.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggabungkan metode historis dan antropologis. Metode historis digunakan untuk melacak akar-akar pandangan masyarakat terhadap bencana alam, lingkungan alam dan pelestariannya. Artinya, kajian ini menempatkan subyek secara diakronis, atau memanjang dalam waktu cakupan. Metode antropologis di sini khususnya adalah perspektif etnografi emik, yang memandang fenomena alam dan sosial budaya dari sudut pandang masyarakat yang menjadi subyek penelitian. Metode ini membuka jalan bagi dilakukannya penjelasan atas fenomena batiniah berupa pengetahuan, pandangan, dan kepercayaan atas bencana dan pelestarian lingkungan yang tidak dapat diamati dengan observasi langsung. Penelitian ini didasarkan pada dua kelompok sumber data, yakni data primer dan data sekunder. Data primer yang dirujuk berupa informasi yang berasal secara langsung dari para saksi atau pelaku, khususnya para korban bencana maupun relawan yang membantu dalam proses evakuasi dan rehabilitasi. Data digali dengan observasi

dan wawancara. Data sekunder dikumpulkan dari berbagai tempat, meliputi antara lain buku-buku, artikel-artikel, hasil penelitian baik yang terpublikasi maupun belum, serta bahan-bahan lain yang relevan dengan subyek kajian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Ragam Bencana dan Akibatnya

Beragam bencana dikenal masyarakat yang mendiami wilayah ujung timur Jawa, atau wilayah yang pada masa kolonial Belanda disebut *Oosthoek* atau Karesidenan Besuki. Keberadaan gunung berapi yang masih aktif, termasuk Raung, Ijen dan Merapi, membuat kawasan Besuki rentan terhadap bencana letusan gunung dan gempa vulkanik. Raffles dalam buku klasiknya, *History of Java*, menyebut letusan gunung yang sangat dahsyat terjadi di bagian barat Blambangan pada zaman Majapahit (Raffles, 2008:459). Rekaman sejarah yang lebih spesifik menengarai bahwa Gunung Raung meletus pada tahun 1586, 1638, 1730, dan tahun 1817. Dari tahun 1600 hingga 1970-an, Gunung Raung memperlihatkan 47 periode aktif, dengan aktivitas terakhir dalam periode ini adalah pada tahun 1977. Letusan Gunung Argapura dilaporkan terjadi di antaranya pada tahun 1597, sedangkan Gunung Ijen dilaporkan meletus pada tahun 1952 (Whitten, dkk, 1996:94). Naturalis Jerman kenamaan, Franz Junghuhn (1852:514-516) menyebut letusan Gunung Ijen yang terekam lebih awal, yakni pada tahun 1796 dan 1817.

Tidak hanya bencana yang terkait dengan aktivitas vulkanik, sebagian kawasan ini juga rentan terhadap banjir dan kekeringan. Bencana hidrometeorologis jenis ini misalnya dilaporkan melanda wilayah Jember Selatan pada

tahun 1942 (Soepardi, 1954: 22). Di Keresidenan Besuki, banjir besar dilaporkan menggenangi wilayah Panarukan pada awal tahun 1952 (*Trompet Masyarakat*, 24 Januari 1952). Banjir besar kembali dilaporkan melanda wilayah Jember dan berlangsung sejak pertengahan Desember 1954 hingga awal Januari tahun 1955. Selain bencana banjir, berbagai tempat di kawasan Besuki juga rentan terhadap kekeringan. Hanya saja berbeda dengan banjir yang datang secara tiba-tiba dan dalam waktu singkat dapat membawa kerusakan parah, kekeringan merambat secara perlahan seiring dengan berkurangnya sumber air. Kehadirannya sebagai bencana menjadi kentara tatkala musim kemarau masuk semakin dalam dan menguat ketika masa kemarau melampaui batas normal. Meskipun sifatnya berbeda, kekeringan pun menyebabkan kerugian dan kesulitan, seperti kegagalan panen, kesulitan mendapatkan air untuk kebutuhan rumah tangga. Kekeringan pun merupakan malapetaka bagi kehidupan.

Kerentanan wilayah Besuki terhadap bencana tidak pernah hilang. Dalam kasus banjir, misalnya, bencana ini masih terus. Banjir masih dilaporkan terjadi, misalnya yang melanda wilayah Situbondo pada tahun 2002 dan 2008. Peristiwa serupa dilaporkan terjadi di kawasan Jember pada dekade pertama tahun 2000-an. Banjir terbesar terjadi pada tahun 2006, yang kemudian ditetapkan sebagai bencana nasional. Kerentanan atas bencana banjir kemudian melahirkan kepercayaan tentang berlakunya siklus bencana bencana. Orang-orang di Situbondo, misalnya, mengenal adanya siklus banjir enam tahunan, berdasarkan pengalaman banjir besar yang mereka alami pada tahun 2002 dan 2008. Sementara itu, orang-orang di Panti Jember, mengenal banjir sebagai fenomena tahunan, terjadi seiring dengan peredaran

musim dari kemarau ke penghujan.

Bencana selalu mendatangkan kerugian baik dari segi material maupun imaterial. Besaran kerugian yang diakibatkan tentu saja bervariasi antara bencana yang satu dengan yang lain, tergantung pada skala dan intensitasnya, khususnya dampak yang ditimbulkan bagi manusia dan berbagai kepentingannya. Dalam salah satu peristiwa banjir besar yang melanda Jember pada masa lalu dan dilukiskan sebagai “banjir terburuk yang pernah terjadi” disebutkan bahwa Distrik Rambipuji, Ambulu, dan Puger menderita paling parah. Banjir ini diberitakan telah menghancurkan 13.404 rumah, korban jiwa 20 orang, dan merusak 690 hektar lahan padi, 512 hektar lahan hortikultura, 1.216 hektar tegalan, 32 ternak besar, dan menghancurkan 12 jembatan (*Trompet Masyarakat*, 27 Desember 1954, 11 Januari 1955, dan 3 Februari 1955).

Kerugian yang disebabkan banjir bandang di Jember pada awal tahun 2006 meliputi 86 orang meninggal, ratusan orang luka-luka, 239 rumah rusak berat, 400 rumah rusak ringan. Banjir bandang tersebut juga telah merusak 10 buah jembatan, 20,6 km jalan, 11 unit dam, saluran pengairan sepanjang 5,35 km, 7,15 ha tanah hilang, 370 ha lahan pertanian, dan 307 ha tanah pekarangan rusak, 8 buah SD hancur, dan 9 SD lainnya rusak ringan. Total kerugian yang diakibatkan oleh banjir bandang tersebut diperkirakan sebesar Rp 103 milyar (Djalal, 2006: 7). Sementara itu, dalam banjir bandang yang melanda Situbondo pada 2008, kerugian ditaksir mencapai Rp 200 miliar. Kerugian meliputi 639 rumah hilang, 5.243 rumah rusak, 6 jembatan hancur, 55 sekolah rusak berat, 38 sekolah, dan fasilitas perkantoran rusak ringan. Banjir bandang ini juga diberitakan telah menelan korban jiwa 15 orang.

Di samping kerusakan fisik dan

korban jiwa, pengalaman-pengalaman individual menggambarkan betapa bencana menorehkan dampak buruk secara psikologis-emosional. Angka statistik tidak mampu menggambarkan dampak jenis ini, melainkan hanya dapat diketahui lewat kesaksian-kesaksian para korban. Junaidi (47 tahun), korban banjir tahun 2006 di Situbondo, menggambarkan kegetirannya, “pikiran tidak menentu, resah, stres, trauma melihat kejadian itu dan saat teringat barang yang hilang, menangis. Sempat berfikir untuk pindah tapi uang dari mana yang dibuat pindah”. Korban lain dalam banjir Situbondo, Sriana (44 tahun), memberikan kesaksiannya, “saya waktu itu sedih, nangis, bayangkan saja rumah saya hanyut dibawa banjir dan saya harus memulai dari bawah lagi”. Kesaksian Astro Prasetyo (52 tahun), korban banjir di Panti Jember pada tahun 2006, menggambarkan sebuah keputusan yang ditimbulkan bencana yang dialaminya.

Singkat kata, dapat dikatakan bahwa bencana telah menjadi bagian nyata perkembangan sejarah di ujung timur Jawa. Terjangan bencana, tidak jarang menyebabkan kerusakan dan kerugian yang tidak kecil, bahkan korban manusia. Bencana adalah ancaman bagi kehidupan. Kerusakan fisik yang ditimbulkan memang dapat dipulihkan kembali, mungkin dalam waktu yang tidak terlalu lama. Akan tetapi, trauma dan kepedihan yang diakibatkannya akan selalu terkenang dalam memori para korban yang mengalami, terlebih mereka yang kehilangan anggota keluarga dan sanak saudara. Bagi mereka banjir meninggalkan luka yang sulit terpulihkan dan mengubah jalan hidup mereka.

Pandangan Orang Jawa

Bagi etnik Jawa di kawasan Besuki, bencana juga disebut sebagai

musibah. Seperti dijumpai dalam masyarakat Jawa pada umumnya, di kalangan mereka bencana juga dimaknai secara berbeda. Beragamnya pemaknaan atas fenomena bencana dipengaruhi oleh tingkat pemahaman atas ajaran-ajaran keagamaan, aspirasi ideologis yang mereka anut dalam kaitan dengan tatanan politik, pengetahuan atas nilai-nilai kultural kejawaan, dan jiwa jaman.

Bekerjanya kompleks faktor yang mempengaruhi pandangan dan pemaknaan orang Jawa pada umumnya atas bencana dapat ditunjukkan dengan ilustrasi gerakan mesianistis di Jawa pada masa lampau. Salah satu versi serat Jayabaya yang terpengaruh eskatologi (perkara-perkara akhir jaman) Islam menyebutkan bencana sebagai tanda-tanda kiamat. Bencana alam termasuk di antaranya air bah, topan, gempa bumi, dan kegelapan diyakini terjadi karena terlepasnya kekuatan jahat (*Jamajuja*) akibat orang tidak lagi menunaikan kewajiban agama (Kartodirdjo, 1986: 91). Pada masa lampau ketika bencana letusan Gunung Krakatau terjadi, orang-orang Jawa menyalahkan diri mereka karena tidak mengikuti ajaran dan anjuran agama, melakukan penyimpangan moral, dan tidak melakukan penentangan terhadap kekuasaan Belanda yang dianggap asing dan kafir (Lapian, 1992: 219-220).

Bencana bagi sebagian orang Jawa juga dimaknai sebagai tanda situasi krisis. Krisis pada masa silam sering dikaitkan dengan keberadaan pemerintahan kolonial yang dianggap kafir, serta penetrasi budaya asing yang membawa dekadensi moral, sosial dan politik dalam kehidupan masyarakat (Kartodirdjo, 1986:93). Bencana alam juga diyakini sebagai indikasi ketidakseimbangan kosmos karena kepemimpinan yang tidak diterima oleh alam. Pemaknaan semacam ini masih dijumpai,

misalnya dikaitkan dengan kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Yusuf Kalla. Kata "*yudho*" mengandung arti perang, penuh pergolakan. Sementara itu, Kala mengingatkan orang pada Batara Kala dalam dunia pewayangan, yang kehadirannya diasosiasikan dengan bencana bagi manusia. Bencana yang bertubi-tubi dalam perspektif mistis Jawa menjadi isyarat alam yang sering melahirkan pertanyaan mendasar menyangkut legitimasi dan kelayakan pemimpin untuk memerintah (Djohan, 2007: 9).

Sebagian orang Jawa yang dekat tradisi kejawaan melihat bencana sebagai pertanda kembalinya agama pra-Islam. Bencana mereka percayai sebagai hukuman atas penolakan untuk kembali ke agama budi. Hal ini didasarkan pada penafsiran atas literatur tradisional *Serat Sabdo Palon*, yang menggambarkan percakapan antara Raja Brawijaya yang memutuskan untuk memeluk Islam dengan pembantunya, Sabda Palon Nayagenggong. Di kalangan orang Jawa yang lebih kuat dengan keislamannya, bencana dimaknai sebagai hukuman dari Tuhan. Akan tetapi, hukuman ini bukan dalam kaitan dengan penolakan untuk kembali pada ajaran-ajaran agama pra-Islam, melainkan hukuman yang dijatuhkan karena pelanggaran atas perintah agama. Di sini dapat dilihat adanya pertarungan wacana. Bencana yang sama dimaknai secara berbeda, bahkan bertolak belakang. Kyai Misraji (74 tahun) yang tinggal di Desa Kemiri, Panti (Jember) mengatakan bahwa bencana adalah hukuman bagi umat manusia di daerah yang terkena bencana karena melalaikan kewajiban beribadah.

Mereka yang lebih fundamentalis pandangan keagamaannya juga memaknai bencana sebagai hukuman Allah. Hukuman dijatuhkan terhadap masyarakat dan pemerintah karena ta-

tanan ekonomi, sosial, politik, dan kultural yang berlaku dalam pandangan orang-orang fundamentalis sebagai bersifat korup, dekadensi, dan bahkan kafir, serta tidak ada harapan untuk diperbaiki. Bertolak dari pandangan ini, bencana lantas dijadikan alasan pembenaran bagi pendapat mereka akan perlunya perombakan tatanan yang rusak tersebut dan menggantikannya dengan tatanan baru yang mengacu secara ketat pada doktrin-doktrin atau syariat agama. Penafsiran secara demikian ini tidak jarang diparalelkan dengan bencana banjir besar yang melanda dunia pada zaman Nabi Nuh. Banjir besar pada zaman Nabi Nuh tersebut diyakini sebagai azab yang diturunkan Allah untuk menghukum umat manusia yang menjalani kehidupan jauh dari ajaran dan perintah-Nya dengan bergelimang kejahatan, kemungkaran dan dosa-dosa (Abdillah, 2001: 87).

Dalam sejarah masyarakat Jawa, pemaknaan bencana sebagai hukuman dan pembenaran untuk menyerukan ajakan kembali pada ajaran agama juga sering dijumpai. Gerakan-gerakan mesianistik pada masa kolonial Belanda tidak jarang menggunakan bencana dan krisis sebagai sarana untuk menggalang dukungan massa rakyat dan mengobarkan apa yang dalam istilah agama disebut dengan perang *sabil* (perang suci) melawan pemerintah kolonial Belanda yang dianggap kafir dengan tujuan menegakkan hukum Islam (Kartodirdjo, 1986: 94).

Tanpa bermaksud menghakimi segi negatif tatanan dan perilaku yang ada di dalam masyarakat, sebagian orang Jawa yang kuat religiusitasnya berpendapat bahwa bencana adalah cobaan atau ujian yang datang dari Allah. Cobaan diberikan Allah untuk menguji kesabaran dan keimanan umatnya. Pemaknaan demikian dikemukakan misalnya Kyai Misrawi dengan merujuk pada

ayat Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 155-156 tentang kepastian adanya ujian dan musibah.

Demikian pula, Mukhammad Mukhlis (32 tahun), yang bekerja sebagai guru, juga mempercayai bencana sebagai ujian yang datang dari Allah bagi kaum beriman. Namun, bagi Mukhlis bencana hadir bagaikan pedang bermata dua. Bencana yang sama bisa hadir dalam wajah yang sama sekali berbeda. Selain sebagai cobaan atau ujian bagi kaum beriman, bagi mereka yang menjalani hidup penuh dengan kemungkaran dan kedurhakaan, bencana adalah azab/hukuman yang ditimpakan Allah. Pandangan semacam ini tipikal di kalangan ulama Islam (Jusmaliani, 2006:19).

Mengenai faktor penyebab banjir, pandangan di antara mereka tampak cukup rasional. Penjelasan atas fenomena banjir mencerminkan pengaruh pengetahuan ilmiah atas fenomena alam dan bagaimana berbagai elemen alam bekerja, meskipun tentu saja dengan tingkatan pengetahuan dan pemahaman yang berbeda-beda. Bencana banjir bandang dan longsor misalnya dihubungkan dengan sejumlah faktor penyebab, baik berdiri sendiri secara terpisah yang memengaruhi peristiwa sebagai faktor tunggal maupun mempengaruhi secara bersama-sama sebagai faktor sebab kolektif. Kompleks faktor tersebut meliputi curah hujan yang tinggi, terlampauinya kapasitas dam/sungai, teknis dalam pengaturan aliran air, dan penggundulan atau alih fungsi hutan alami.

Kaitan antara ketiga faktor sebagai penyebab banjir terlihat jelas dalam pandangan para informan Jawa dengan latar belakang pendidikan yang memadai. Kasdi (54 tahun), seorang pegawai negeri dan sekaligus korban banjir di Situbondo mengungkapkan bahwa faktor penyebabnya karena curah hujan

yang tinggi dan juga karena dam tidak pernah dibuka.

Sebagian informan meyakini bahwa bencana banjir bandang dan longsor sebagai dampak terjadinya alih fungsi lahan. Bencana banjir yang melanda wilayah Panti Jember, misalnya, dikaitkan dengan alih fungsi lahan di pegunungan Argapura. Menurut pandangan ini, kawasan lereng Argapura mestinya tetap dipertahankan sebagai kawasan dengan tutupan hutan alami yang mempunyai fungsi maksimum dalam perlindungan tanah dan air. Akan tetapi, pengalihan lahan dari hutan alami menjadi hutan produksi, khususnya perkebunan kopi, telah mengurangi fungsi proteksi tersebut. Karena sistem perakaran kopi yang dangkal, tanaman kopi lebih rendah kemampuannya untuk mengikat tanah dibanding tanaman beragam dalam hutan alami. Akibatnya, lereng perbukitan mudah longsor ketika terjadi guyuran hujan deras.

Volume air yang besar dan aliran yang deras mengubah aliran permukaan yang tidak terserap ke dalam tanah menjadi banjir bandang yang menghancurkan kehidupan di kawasan yang terkena terangan. Banjir bandang yang menerjang kawasan selatan Jember termasuk Rambipuji, Bangsalsari dan Balung dipandang sebagai kiriman dari daerah lereng Argapura. Mereka terdampak oleh perkebunan kopi yang sudah berkembang sejak masa kolonial Belanda dan terus berlanjut berkembang serta meluas sejak nasionalisasi perusahaan perkebunan asing sejak 1957. Perkebunan kopi ini dimiliki baik oleh perusahaan daerah maupun swasta. Meskipun tidak ikut menikmati kemakmuran yang didatangkan oleh sistem produksi komoditas komersial kopi, masyarakat di kawasan tersebut ikut terkena dampak negatifnya. Dalam ungkapan Jawa mereka adalah orang-orang

yang "*ora mangan nangkane kena pulute*" atau tidak menikmati nangjanya (hasilnya), namun terkena getahnya (dampak buruknya).

Mayoritas informan mengatakan bencana banjir bandang dikenali tandatandanya lewat pembacaan atas fenomena alam. Dalam peristiwa banjir di Panti tahun 2006, informan menyatakan bahwa sebelum bencana terjadi, sebelumnya terjadi kondisi cuaca yang buruk dan hujan deras.

Sebagian besar informan memberi kesaksian bahwa sebelum bencana banjir terjadi tidak ada firasat gaib, mimpi atau lainnya. Bahkan mereka yang kehilangan anggota keluarga dalam peristiwa bencana karena menjadi korban meninggal juga menyatakan tidak ada firasat apapun. Sebagai perkecualian, Amina (45 tahun), yang sehari-hari bekerja sebagai pedagang dan tinggal di dekat sungai di Dusun Kantongrejo, Desa Kemiri (Panti, Jember) mengaitkannya dengan firasat mimpi.

Terkait dengan pencegahan terhadap terjadinya bencana, upaya terpenting yang dilakukan para informan adalah bagaimana harus hidup dan selalu berusaha mendekatkan diri dengan Tuhan. Perlindungan dari bencana mereka upayakan melalui kagiatan ngaji, dzikir, salat, dan salat bersama (*istighosah*). Di sini tampak jelas bahwa sebagian informan Jawa termasuk dalam kategori Geertz sebagai golongan santri, yang kuat pengaruh Islamnya. Akan tetapi, sebagian informan Jawa yang dekat dengan tradisi *abangan* mengupayakan perlindungan diri dari ancaman bencana melalui *sikep* (Wessing, 2010:56). *Sikep* adalah jimat (*sipad kandel*) yang diperoleh dari orang yang mempunyai kelebihan (*wong pinter*) berisi kutipan ayat-ayat atau mantra yang diyakini mengandung kekuatan spiritual untuk memberikan perlindungan dan keberuntungan.

Pandangan Etnik Madura

Pengalaman penduduk setempat terkait dengan bencana bukan saja terekam dalam pengalaman sejarah, melainkan juga tercermin dalam cerita tradisional. Sebagai contoh, dalam buku berjudul *Cerita Rakyat dari Jember* (Santosa dan Wibisono, 2004 :41-44), dikisahkan tentang asal-usul nama Gunung Manggar, Gunung Bacok, dan Gunung Watu Pecah di Kecamatan Ambulu Jember. "Pertempuran" yang melibatkan gunung-gunung tersebut digambarkan menyebabkan suara gemuruh dan menimbulkan banyak korban manusia di sekitarnya karena tertimpa bebatuan. Hal ini dapat dipandang sebagai simbolisasi bencana yang tidak asing lagi bagi mereka yang bermukim di kawasan tersebut.

Bagi etnik Madura bencana bukan semata-mata dilihat sebagai fenomena alamiah. Ketaatan agama yang tergolong kuat membuat mereka melihat bencana dari kacamata religius. Misalnya, Suyono (42 tahun), Kepala Desa Kemiri (Panti, Jember) memaknai bencana sebagai ujian dari Tuhan untuk menguji keimanan. Dalam cerita asal-usul Kedung Sukma Ilang di sebuah dusun di Kecamatan Sukrambi Jember (Santosa dan Wibisono, 2004:41-44), bencana dimaknai sebagai hukuman karena melupakan Tuhannya. Sikap religius dalam memaknai bencana lebih jelas lagi terungkap dalam pandangan Ustadz Abdurrohman (55 tahun), yang menjabat sebagai takmir masjid di Sumberkolak (Situbondo). Dikatakannya: "Saya masih meyakini bahwa kejadian ini [bencana banjir bandang] tidak lepas dari campur tangan Tuhan. ... Manusianya kurang bertobat, maka dari itu diberi bencana oleh Tuhan".

Seperti halnya orang Jawa, konsepsi orang Madura terkait dengan proses terjadinya bencana juga me-

ngandung unsur yang bersifat rasional. Tentang penyebab banjir bandang di Situbondo tahun 2008, misalnya, ada kepercayaan kuat bahwa bencana terjadi karena kiriman dari Bondowoso yang mendapat guyuran curah hujan sangat tinggi selama beberapa hari dan pengaturan pintu air di Dam Sampean.

Pandangan tersebut tidak tanpa sanggahan. Salah seorang staf Dam Sampean mengatakan bahwa pembukaan pintu air dam bukan satu-satunya penyebab bencana banjir bandang di Situbondo. Menurutnya, air yang dilepas lewat pembukaan pintu dam sebenarnya sudah memperhitungkan kapasitas sungai untuk menampung. Akan tetapi, ada aliran air dalam volume besar yang ikut masuk ke Sungai Sampean lewat beberapa anak sungai akibat tingginya curah hujan, sehingga melebihi kapasitas dan mengakibatkan banjir.

Unsur rasional orang Madura dalam menjelaskan banjir tampak dalam pengaitan bencana banjir dengan konversi areal hutan untuk berbagai kepentingan. Peralihan kawasan hutan menjadi kawasan pemukiman, pertanian dan perkebunan dipandang sebagai faktor yang juga bertanggung jawab atas peristiwa banjir bandang yang menerjang beberapa bagian wilayah Situbondo. Eko Wahyudi, seorang Madura yang menjabat sebagai Kepala Dinas Irigasi berpendapat bahwa masyarakat Situbondo hanya menanggung efek negatif peralihan fungsi lahan yang berlangsung di wilayah Situbondo. Dikatakannya bahwa bencana banjir yang menyengsarakan masyarakat di Situbondo adalah harga yang harus dibayar atas peningkatan kemakmuran, yang orang-orang di Situbondo sebenarnya tidak menikmati, tetapi dinikmati orang-orang di Bondowoso.

Berdasarkan pengalaman mereka, bencana banjir tidak ditandai dengan

firasat gaib, mimpi atau lainnya. Tanda-tanda terjadinya bencana dibaca lewat fenomena alam. Mengenai bencana banjir yang terjadi pada 2008, menurut para informan, didahului dengan hujan lebat selama beberapa hari di Bondowoso.

Banjir datang menerjang Situbondo pada sekitar pukul 21.00. Sekitar pukul 05.00 air sudah menghilang karena dalamnya sungai, namun meninggalkan puing-puing kerusakan, lumpur, bebatuan, dan batang-batang dan akar pohon.

Bagi mereka, pencegahan terjadinya bencana adalah persoalan bagaimana manusia harus hidup dan selalu mendekatkan diri dengan Tuhan. Oleh karena itu, sejajar dengan pandangan ini perlindungan dari bencana dapat diperoleh melalui *ngaji*, zikir, salat, dan salat bersama (*istighosah*) (Wessing, 2010:56). Orang-orang Madura yang tinggal di dekat Sungai Sampean mengadakan *istighosah* saat musim hujan mulai datang untuk memohon agar dijauhkan dari bencana. Bahkan, pada acara arisan yang diadakan pada setiap hari Sabtu, ibu-ibu di daerah Sumberkolak Situbondo juga memanjatkan doa bersama agar tidak terkena bencana banjir lagi. Demikian pula halnya dengan yang dijumpai pada orang-orang Madura di Desa Kemiri, mereka melakukan *istighosah* meminta pertolongan Tuhan agar banjir tidak terjadi lagi, dan memohon keselamatan dari musibah.

Kontras dengan pentingnya upaya menghindari bencana lewat aktivitas religius yang ditekankan hampir semua informan, sangat jarang di antara mereka yang secara individual dan secara sadar melakukan penghijauan sebagai bagian nyata yang mereka dapat lakukan untuk mencegah bencana. Srianan, pemecah batu yang tinggal di Ardirejo Situbondo mengungkapkan, "Kalau saya menanam pohon, tapi di Bondowoso hutannya tetap gundul, ya per-

cuma saja. Di sini [Situbondo] masih tetap akan terkena banjir". Demikian pula dengan Haenur (44 tahun), seorang pegawai negeri di Situbondo mempunyai pandangan serupa.

Konsepsi atas Pelestarian Lingkungan Pandangan Orang Jawa

Orang-orang Jawa di Besuki pada umumnya memandang pelestarian lingkungan sebagai bagian penting dari upaya pencegahan bencana. Kesaksian para informan mengenai bagaimana bencana banjir bandang dapat ditangkal secara eksplisit menyebut perlunya dilakukannya kegiatan penanaman pohon di tepi-tepi sungai, tidak mengeruk pasir di pinggir sungai, tidak membangun rumah di bantaran sungai, dan menjaga hutan pegunungan supaya tidak rusak dan gundul. Bencana diyakini terjadi karena rusaknya lingkungan khususnya hutan yang berfungsi sebagai pengatur tata air.

Pandangan tersebut bisa dikatakan merupakan fenomena baru, yang akar kemunculannya dapat dilacak sejak dekade terakhir abad ke-19, seiring dengan perkembangan kesadaran konservasi di kalangan orang-orang Eropa di Hindia Belanda. Di wilayah Besuki sendiri hingga awal abad ke-20 masih terdapat hutan yang relatif luas. Kebutuhan untuk melestarikan hutan belum dipandang sangat urgen. Banyak migran Jawa yang masuk ke wilayah ini terlibat dalam pembukaan hutan. Pembukaan hutan baru telah menjadi bagian dari tradisi Jawa, yang biasa diistilahkan dengan *babad*. Pembentukan kerajaan-kerajaan Jawa biasanya diawali dengan kegiatan pembukaan hutan. Dalam pandangan tradisional Jawa, hutan sering digambarkan sebagai tempat yang menakutkan, angker dan penuh bahaya bagi orang kebanyakan karena

dihuni oleh roh-roh halus dan penyakit (Lombard, 1983:271-272).

Pandangan mistis magis semacam ini membuat hutan jarang dirambah karena diyakini bahwa merambah hutan berarti mengganggu keberadaan roh-roh halus penghuni hutan. Gangguan terhadap mereka dapat berakibat fatal bagi ketenteraman, kesehatan, dan kelangsungan hidup mereka yang melanggar. Historiografi tradisional Jawa, *Babad Tanah Jawi*, memberikan ilustrasi tentang bagaimana upaya-upaya awal dalam pembukaan hutan untuk dijadikan kerajaan mendapatkan gangguan dari roh-roh halus penghuni hutan. Oleh karena itu, seringkali digambarkan bahwa hanya tokoh-tokoh pilihan saja, yang mempunyai daya kekuatan dan keunggulan spiritual berani masuk kawasan hutan yang liar, penuh bahaya dan menakutkan (Whitten, dkk., 2000:674-675). Karena tidak banyak yang berani masuk dan merambah secara sembarangan, lingkungan hutan pada masa lalu sedikit mendapat gangguan sehingga tetap terjaga kelestariannya.

Akan tetapi, pandangan mistis magis mulai memudar seiring dengan perkembangan modernitas, komersialisasi, dan tekanan demografis. Di bawah pengaruh dan tekanan faktor-faktor ini, orang Jawa pun kemudian melihat hutan dan lingkungan dari kacamata pemenuhan kebutuhan ekonomis. Tanpa dapat dielakkan lagi, lingkungan disubordinasikan oleh kepentingan ekonomi dan akhirnya memunculkan tanda-tanda kerusakan. Serangkaian bencana menjadi harga yang harus dibayar atas kerusakan tersebut sehingga kemudian berkembanglah kesadaran akan pentingnya pelestarian lingkungan. Dalam alam ke-modernan tentu saja lingkungan yang lestari tidak mungkin lagi terwujud hanya sebagai efek samping dari keper-

cayaan mistis magis, tetapi harus merupakan hasil yang disengaja dari upaya-upaya konkret yang memang ditujukan untuk mewujudkan tujuan tersebut.

Berkaitan dengan persoalan siapa yang bertanggung jawab terhadap pelestarian lingkungan, terdapat perbedaan pandangan di kalangan mereka. Sebagian informan menyatakan bahwa pemerintahlah sebagai pihak yang paling bertanggung jawab dalam urusan pelestarian lingkungan. Menurut Kasdi, pemerintah mempunyai kapasitas dari segi pendanaan dan teknologi untuk melakukan upaya-upaya pelestarian lingkungan. Ahmadi (50 tahun), yang bekerja sebagai petani di Desa Kemiri (Panti) mempunyai pandangan serupa, namun dengan alasan lain. Ahmadi mengatakan bahwa yang harus bertanggung jawab adalah pemerintah. Karena pada waktu Gus Dur menjadi presiden memberi kebebasan tentang hutan.

Dengan kata lain, diyakini bahwa perusakan hutan oleh rakyat disebabkan oleh kesalahan pemerintah. Oleh karena itu, pemerintah pula yang dipandang harus memikul tanggung jawab untuk memulihkan kelestarian hutan. Tanggung jawab tidak bukan terletak di pihak rakyat yang menjadi korban dan merasakan akibat buruk yang ditimbulkan oleh rusaknya lingkungan hutan.

Tidak mengherankan, dengan pandangan tersebut meskipun mengakui pentingnya pelestarian lingkungan, sangat jarang informan yang mengatakan ikut aktif dalam melestarikan lingkungan dengan menanam pohon. Di antara yang sedikit itu adalah Kyai Misraji (74 tahun), yang mengatakan telah menanam pohon di pinggir sungai di dekat sawah miliknya. Lebih banyak informan yang belum menyadari kontribusi dan peran aktif yang mereka sebenarnya dapat mainkan dalam konteks upaya kolektif untuk mewujudkan kelestarian lingkungan.

Sebagian informan Jawa lainnya memang memandang bahwa pelestarian lingkungan menjadi tanggung jawab bersama. Menurut Astro Prasetio dan Amina, semua elemen masyarakat harus bertanggungjawab terhadap pelestarian lingkungan. Menurut pandangannya, setiap manusia yang hidup di muka bumi ini tidak lepas dari tanggungjawab, khususnya tanggungjawab atas lingkungan.

Konsepsi atas Pelestarian Lingkungan Pandangan Etnis Madura

Orang-orang Madura di Besuki pada umumnya mengakui bahwa pelestarian lingkungan merupakan langkah penting dalam rangka mencegah terjadinya bencana khususnya banjir bandang dan tanah longsor. Pengakuan tersebut tampak jelas dari pendapat yang disampaikan para informan. Kegiatan-kegiatan yang dipandang penting dan perlu dilakukan dalam kaitan dengan pelestarian lingkungan, antara lain penyadaran publik (rakyat) tentang pentingnya menjaga kelestarian lingkungan, pemertahanan hutan alami dengan kegiatan reboisasi dan penghijauan, penataan jalur-aliran sungai, pencegahan pendirian bangunan dan pemukiman di bantaran sungai.

Pandangan menjadi lebih beragam ketika dikaitkan dengan persoalan pihak yang mestinya bertanggungjawab dalam pelestarian lingkungan. Mereka yang mewakili pemerintah cenderung berpendapat bahwa pelestarian lingkungan menjadi tanggung jawab bersama. Pandangan ini misalnya diwakili, Suryono (42 tahun), Kepala Desa Kemiri.

Pandangan serupa dikemukakan oleh Junaidi, yang menjabat ketua RT di Sumberkolak (Situbondo). Menurutny, pelestarian lingkungan adalah tanggung

jawab bersama antara pemerintah dan masyarakat. Abdurrachman (48 tahun), seorang anggota kepolisian yang tinggal di Dusun Dam Sumberkolak Situbondo, menekankan pentingnya tanggungjawab bersama dalam soal ini. Dikatakannya, “Kalau hanya pemerintah, sistem ini [pelestarian lingkungan] tidak akan berjalan”.

Pandangan tentang tanggung jawab bersama dalam pelestarian lingkungan tidaklah monopoli kalangan pemerintah. Sutiani (55 tahun), seorang ibu rumah tangga yang tinggal di Sabang, Panarukan mengemukakan bahwa kerjasama yang baik antara pemerintah dan masyarakat akan memberi hasil baik dalam mewujudkan kelestarian lingkungan. Demikian pula, Sriana (44 tahun) menyatakan bahwa perlu kerja sama antara pemerintah dan masyarakat.

Pengakuan akan pentingnya pelestarian lingkungan, tidak otomatis berarti bahwa masing-masing individu berpartisipasi aktif di dalamnya. Ternyata hanya sebagian kecil informan menyatakan secara nyata berpartisipasi aktif dengan melakukan penanaman pohon untuk melestarikan lingkungan. Mayoritas informan menyatakan berpartisipasi dalam wujud keterlibatan dengan kegiatan doa bersama (*istigoshah*) untuk memohon agar dihindarkan dari bencana.

Ironisnya, pengakuan akan pentingnya pelestarian lingkungan tidak selalu sejalan dengan tindakan-tindakan konkret. Kontradiksi seringkali muncul karena tekanan ekonomis atau tuntutan kebutuhan subsistensi. Bagi sebagian penduduk Madura yang bermukim di dekat kawasan hutan, pengambilan hasil hutan tidak jarang menjadi satu-satunya sumber penghasilan untuk menopang kebutuhan hidup. Dalam skala urutan yang lebih rendah, nilai ekonomis hutan juga dikaitkan

dengan penyediaan sumber makanan ternak, yang merupakan bagian integral dari kehidupan rumah tangga petani. Hubungan ekonomis yang melibatkan orang Madura dan lingkungan hutan semacam ini memang sudah berlangsung lama. Pada zaman Belanda pun fenomena demikian sudah ditemukan misalnya di perbukitan Brebes dan Besser, serta lereng Gunung Raung (*Verslag*, 1928: 95).

Meskipun tindakan mengambil kayu-kayu hutan sebenarnya bersifat ilegal dan termasuk pencurian, pelaku tampaknya jarang mengenal istilah jera. Berbagai upaya penanggulangan aksi pencurian melalui penyuluhan dengan melibatkan sejumlah instansi terkait seperti pihak perhutani, aparat pemerintah desa, dan kepolisian tidak efektif mencapai sasaran. Upaya represif terhadap pencurian kayu hutan melalui penggeledahan rumah-rumah penduduk di sekitar kawasan hutan, penangkapan dan bahkan penahanan terhadap mereka yang terbukti mencuri tidak pernah membuat jera dan pencurian kayu reda.

Kesaksian yang disampaikan perangkat Desa Gunosari, Kecamatan Tlogosari (Bondowoso) misalnya mengungkapkan bahwa warganya yang keluar dari penjara karena kasus pencurian kayu hutan tetap saja mengulangi perbuatan yang sama. Alasan mereka tetap melakukan pengambilan kayu hutan secara ilegal, selain untuk menjamin kelangsungan hidup subsisten keluarga, juga karena dalam pengalaman hidup mereka, pengambilan kayu hutan secara ilegal untuk kepentingan pribadi juga tidak jarang dilakukan oleh oknum-oknum Perhutani. Menurut anggapan mereka, aksi-aksi semacam ini hanya dibiarkan begitu saja dan tidak ada upaya serius untuk menindak dan menjatuhkan sanksi hukum secara tegas terhadap para pelanggar.

Aksi pengambilan kayu hutan secara ilegal bertambah marak terutama tahun-tahun awal era reformasi. Fenomena ini mirip ketika terjadi transisi dari masa penjajahan ke masa kemerdekaan. Parahnya deforestasi masa transisi ini disebabkan munculnya konsepsi yang keliru mengenai kemerdekaan sebagai bebas dari aturan apapun, termasuk bebas membabat hutan untuk lahan pertanian dan kayu bakar (Soepardi, 1954:38).

Pada masa reformasi, dengan alat-alat yang lebih maju, termasuk gergaji mesin, pembalakan hutan berlangsung lebih marak. Kerusakan yang ditimbulkan juga lebih parah dan lebih luas. Aksi-aksi semacam ini mencerminkan dominasi pandangan ekonomis atas hutan. Kayu-kayu hutan hanya dipandang sebagai "komoditas" untuk tujuan-tujuan komersial dalam rangka pengerukan keuntungan finansial sesaat tanpa mempertimbangkan fungsi-fungsi hidrologis dan perlindungan tanah yang penting bagi kehidupan.

Kurangnya apresiasi dan kesadaran masyarakat Madura yang tinggal di pinggiran hutan sepanjang Sungai Sampayan untuk secara konkret ikut melestarikan lingkungan hutan agaknya juga terkait dengan pengalaman sehari-hari mereka. Seperti dikemukakan beberapa informan di kawasan pinggiran hutan di Kecamatan Tlogosari, Bondowoso, meskipun hutan rusak, mereka tidak merasakan dampak yang ditimbulkan dengan rusaknya hutan. Berbagai dampak yang sering dikemukakan sejumlah pihak seperti krisis air pada musim kemarau dan ancaman banjir pada musim penghujan belum menjadi kenyataan empiris yang mereka alami secara langsung. Kalaupun pada awal tahun 2002 dan 2008 terjadi banjir bandang yang menghancurkan bukan mereka yang merasakan secara langsung, melainkan mereka yang tinggal

jauh di daerah Situbondo.

SIMPULAN

Berdasarkan paparan di atas dapat disimpulkan bahwa pengetahuan mengenai bencana dan pelestarian lingkungan baik bagi etnis Jawa dan Madura bersumber dari pengalaman langsung maupun memori sejarah yang diwarisi dari generasi terdahulu. Pembacaan terhadap tanda-tanda alam merupakan sarana penting untuk mengenali datangnya bencana. Proses terjadinya bencana pun dicoba dimengerti dan dijelaskan berdasarkan pengetahuan umum atau pengetahuan ilmiah sejauh yang mereka dapat pahami. Di kalangan orang Jawa terdapat beragam pemaknaan atas fenomena bencana: hukuman atas penolakan untuk kembali pada ajaran pra Islam atau ketidaktaatan pada ajaran Islam, ujian atas keimanan, bukti perlunya adopsi hukum dan doktrin agama dalam praktek politik, pertanda akan terjadinya perubahan tatanan politik atau penguasa. Di kalangan orang Madura dikenali dua pemaknaan tentang bencana, sebagai hukuman yang ditimpakan Allah terhadap mereka yang hidup penuh kemungkaran termasuk merusak alam dan ujian atas ketaatan dan keimanan umat.

Terkait dengan pelestarian lingkungan, baik orang Jawa maupun Madura melihat pelestarian lingkungan penting dalam rangka upaya pencegahan bencana. Rusaknya lingkungan khususnya hutan yang berfungsi sebagai pengatur tata air diyakini keduanya sebagai akar bencana, khususnya banjir bandang dan longsor. Pengetahuan tentang pentingnya pelestarian lingkungan sebagai bagian dalam pencegahan bencana mencerminkan kesadaran yang terbangun sebagai hasil penyebaran gagasan ilmiah se-

jak akhir abad ke-19. Pada masa lampau lingkungan yang lestari lebih merupakan efek samping dari pandangan mistis tentang lingkungan. Lingkungan yang lestari diyakini sebagian informan menjadi tanggung jawab pemerintah. Meskipun ada pengakuan atas tanggung jawab kolektif pemerintah dan masyarakat, tindakan partisipatif yang konkret masih jarang dijumpai. Partisipasi lebih banyak diungkapkan dalam kegiatan doa bersama (*istighosah*). Kurangnya partisipasi aktif terkait beberapa alasan: (1) Keraguan terhadap efektivitasnya terkait penjagaan kelestarian lingkungan di daerah hulu (tempat lain), (2) Dampak rusaknya lingkungan sering tidak dirasakan langsung oleh para pelaku kerusakan, (3) Keraguan bahwa aparat pemerintah secara konsisten dan serius melakukan konservasi lingkungan.

Berdasarkan temuan tersebut dapat disampaikan beberapa rekomendasi berikut ini: (1) Perlu dilakukan penyadaran publik oleh pemerintah dan aktivis lingkungan secara terus menerus sehingga partisipasi dalam bentuk kegiatan religius sebagai upaya mencegah bencana dibarengi pula dengan tindakan-tindakan konkret; (2) Perlu dikembangkan kajian tentang model pelestarian lingkungan yang menyinergikan peran kolektif pemerintah dan masyarakat yang dibangun berdasar konteks etnis dan lokalitas yang berbeda sebagai bagian dari upaya kolektif kearah penanganan dan mitigasi bencana.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdillah, Mujiyono. 2001. *Agama Ramah Lingkungan: Perspektif Al-Qur'an*. Jakarta: Penerbit Paramadina.
- Boomgaard, Peter, 1999. "Oriental Nature, its Friends and its Enemies: Conservation of Nature in Late-Colonial Indo-

- nesia", *Environment and History*, 5, 3, hlm. 257-292
- Djalal, MZA. 2006. "Bencana Alam dan Implementasi Tata Ruang di Kabupaten Jember". Makalah disampaikan pada Diskusi Panel, *Tata Ruang Sudah Diatur Bencana Lingkungan Tetap Datang, Tanya Kenapa?* yang diselenggarakan oleh Kementerian Negara Lingkungan Hidup di Jakarta, 15 Juni.
- Djohan, Eniarti B. 2007. "Mengapa Kajian Bencana", *Masyarakat Indonesia*, 23, 2, hlm. 1-13.
- Elson, R.E. 1994. *Village Java under the Cultivation System, 1830-1870*. Sydney: Allen & Unwin.
- Junghuhn, Franz Wilhelm. 1852. *Reizen door Java: Voornamelijk door het Oostelijk Gedeelte van dit Eiland*, Vol. 2. Amsterdam: P.N van Kampen.
- Jusmaliani. 2006. "Bencana dalam Pandangan Islam", *Masyarakat Indonesia*, 34 (1), hlm. 1-23.
- Kartodirdjo, Sartono. 1986. *Ungkapan-ungkapan Filsafat Sejarah Barat dan Timur: Penjelasan Berdasarkan Kesadaran Sejarah*. Jakarta: Gramedia.
- Lapian, A.B. 1987. "Bencana Alam dan Penulisan Sejarah", dalam T. Ibrahim Alfian dan H.J. Koesoemanto, et al., (ed.), *Dari Babad dan Hikayat sampai Sejarah Kritis*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, hlm. 211-231.
- Ledeboer, A.J.M. 1934. *Natuurbescherming door Particulieren, het Jang-Plateau Oost-Java Nederlansch-Indie*. Tanpa tempat dan penerbit.
- Lombard, Denys. 1983. "Pandangan Orang Jawa Terhadap Hutan", *Citra Masyarakat Indonesia*. Jakarta: Sinar Harapan, hlm. 262-275.
- Raffles, Thomas Stamford. 2008. *The History of Java*. Jakarta: Penerbit Narasi
- Ricklefs, M.C. 1993. *A History of Modern Indonesia since 1300*. Basingstoke: Macmillan.
- Santosa, Edy dan Deny Wibisono. 2004. *Cerita Rakyat dari Jember*. Jakarta: Grasindo.
- Soepardi, Rd. 1954. *Hutan Reboisasi Mempertinggi Kemakmuran*. Jakarta: Perpustakaan Perguruan Kementerian P.P. dan K.
- Suhanda, Irwan. 2011. *Bencana Mengancam Indonesia*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas.
- Trompet Masyarakat. "Bandjir Besar Di-daerah Panarukan", *Trompet Masyarakat*, 24 Januari 1952.
- Trompet Masyarakat. "Kerugian Akibat Bandjir Melebihi Dari Dugaan Semula", *Trompet Masyarakat*, 3 Februari 1955.
- Trompet Masyarakat. "Kerugian Bandjir di Djember Selatan", *Trompet Masyarakat*, 11 Januari 1955.
- Trompet Masyarakat. 1952. "20 Orang Mati Karena Bandjir Besar di Djember", *Trompet Masyarakat*, 27 Desember.
- Van Goor, CP dan Junus Kartasubrata, et al., 1982. *Indonesian Forestry Abstracts: Dutch literature until about 1960*. Wageningen: Centre for Agricultural Publishing and Documentation
- Verslag. 1928. *Verslag van den Dienst van het Boschwezen in Nedelandsch-Indië over het Jaar 1927*. Batavia: Landsdrukkerij.
- Verstegen, Wybren, Jan Luiten van Zanden, dan Henk van Zon, 1994. "Inleiding", *Tijdschrift voor Geschiedenis*, 107, 3, hlm. 323-330.
- Wessing, Robert. 1991. "Which Forest?: Population, Environment, and Perception on Java. Paper pada Konferensi "The Role of ASAIHL Universities in Promoting Preservation of the Environment, Universitas Airlangga, 6-8 May.
- Wessing, Robert. 2010, "Porous Boundaries: Addressing Calamities in East Java, Indonesia" *Bijdragen tot de Taal-, Land-en Volkenkunde*, 166, 1, hlm. 49-82.
- Whitten, Tony et al. 1996. *The Ecology of Java and Bali*. Singapore: Periplus.